

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harus diakui bahwa dalam memperebutkan kursi legislatif pada pemilihan umum di Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah. Khususnya pada kasus perempuan yang ingin ikut memperebutkan posisi tersebut sebagai bentuk dari keterlibatan partisipasi perempuan di bidang politik. Dalam keterlibatan partisipasi politik, perempuan memiliki cerita perjuangan yang panjang dan rumit demi mendapatkan hak politiknya di Indonesia.

Jika diceritakan secara historis, pemilihan umum legislatif pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 yang masih berbentuk sangat sederhana baik dari segi regulasi, strategi ataupun persaingan antar peserta kontestasi. Keterlibatan perempuan dalam hal politik, yakni perempuan sebagai peserta kontestasi pemilihan umum legislatif memerlukan berbagai usaha serta perjuangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kandidat peserta laki-laki. Hal ini karena lahirnya budaya patriarki yang kuat sejak sebelum pemerintahan Indonesia itu berdiri, sehingga membuat nasib kaum perempuan sering kali mendapatkan diskriminasi oleh kaum laki-laki dalam mendapatkan hak yang sama. Muncul berbagai macam hambatan terhadap keterlibatan perempuan dalam bidang politik sebagai dampak dari adanya budaya patriarki yang sudah ada sejak lama. Kehadiran budaya patriarki di Indonesia sangat kuat di era kolonialisme dan imperialisme. Budaya tersebut telah membuat suatu perbedaan kelas sosial antara kaum laki-laki dengan perempuan, yang dimana kaum perempuan berada pada kelas sosial paling bawah daripada laki-laki sehingga kaum perempuan menjadi kaum yang paling menderita karena mendapatkan perbedaan hak dalam berbagai aspek kehidupan sebagai manusia serta warga negara yang sama.

Pergerakan biasanya muncul karena didorong oleh semangat untuk memperbaiki struktur sosial yang dianggap tidak setara menjadi setara atau lebih adil, sama halnya dengan latar belakang dari kemunculan gerakan

perempuan. Secara historis, kemunculan gerakan perempuan di berbagai negara didorong oleh kondisi sosiopolitik negara tersebut. Lahirnya gerakan perempuan ini terjadi dengan tujuan untuk memperbaiki struktur pemerintahan dan sosial budaya yang ada sehingga menimbulkan gejala perlakuan tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Meskipun budaya patriarki masih ada di Indonesia sampai saat ini, namun lambat laun budaya tersebut sudah mulai terkikis oleh perkembangan zaman yang semakin maju (modernisasi). Saat ini mayoritas perempuan sudah berani mengutarakan pendapatnya di depan umum, sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang yang menyatakan secara jelas bahwa semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak untuk menyampaikan seluruh pendapatnya.

Sejak era reformasi, partisipasi politik perempuan dalam proses pengambilan kebijakan negara telah menjadi bagian penting dalam pemerintahan dan badan legislatif. Dalam sistem demokrasi inklusif, masyarakat memainkan peran penting dalam memastikan partisipasi politik perempuan dapat berjalan lebih luas dan setara. Persoalan keterwakilan merupakan syarat utama untuk mewujudkan demokrasi. Meskipun saat ini banyak hak-hak politik perempuan yang telah diakui, namun hal ini tidak menjamin bahwa hak perempuan atas partisipasi politik akan diterapkan dengan baik dalam praktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan penting dalam kebijakan aktual dan kebijakan yang ada bersifat sensitif gender. Sekalipun hak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik diakui, bahkan ketika perempuan benar-benar terlibat dalam politik, keterlibatan aktif mereka tidak dapat dengan mudah diwujudkan. Sebagai warga negara, perempuan seharusnya mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam seluruh proses demokrasi (Soetjipto, 2005: 24-27).

Situasi politik Indonesia sejak era reformasi hingga saat ini pada dasarnya sudah mengalami kemajuan terhadap kepedulian nasib kaum perempuan, yang diatur dalam berbagai regulasi mengenai peran perempuan dalam bidang politik. Salah satunya ialah aturan mengenai kewajiban kuota 30% bagi calon legislatif perempuan yang tertuang dalam beberapa Undang-Undang, yakni

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilihan Umum tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, fakta yang ditemukan adalah untuk melaksanakan regulasi tersebut secara sepenuhnya, yakni perempuan melakukan praktik politik bukanlah hal yang mudah di lapangan. Dalam praktiknya, kuota 30% yang telah ditetapkan oleh undang-undang tidak langsung dapat tercapai sepenuhnya, dan mayoritas pencapaian kuota yang dilakukan oleh para partai politik masih bersifat formalitas. Jika, kuota tersebut tidak terpenuhi, KPU akan menyatakan partai politik tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga partai tersebut tidak dapat ikut serta dalam kontestasi pemilihan umum. Hal ini membuktikan bahwa adanya ketidaksesuaian antara legalitas dan kenyataan di lapangan sehingga banyak faktor yang menjadi kendala dan menjadikan peran perempuan kurang optimal di bidang politik dalam negara.

Mayoritas di negara yang masih berkembang, partisipasi politik perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini juga termasuk menjadi hambatan karena lebih banyak perempuan yang memilih terlibat dalam persoalan internal keluarga dibandingkan dengan persoalan politik dan negara (Muawanah, 2009: 157). Partisipasi politik perempuan melibatkan perempuan berperan dalam berbagai bidang, seperti menjadi seorang pengamat politik, dosen, aktivis, dan anggota parlemen, yang secara sukarela ikut serta dalam proses pembentukan kebijakan agar perempuan dapat terlibat aktif dalam bidang politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum perempuan mempunyai hak untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, terutama partisipasi dalam bidang politik, yang dimana hal ini berdampak signifikan terhadap perkembangan produk politik yakni kebijakan (Warjiyati, 2016: 27).

Keterbatasan akses merupakan salah satu hambatan lainnya yang dihadapi perempuan dalam membuktikan bahwa sistem politik tidak sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan kaum laki-laki saja. Terkait perempuan yang berada dalam anggota dewan di parlemen, salah satu tantangan bagi perempuan

bukan hanya terbatasnya akses mereka untuk membuktikan bahwa kepentingan mereka tidak sepenuhnya diperhitungkan dalam sistem politik. Selain itu, perempuan juga tidak diberi kuota, kualitas dan tanggung jawab yang signifikan dalam hal politik sebagai anggota dewan di parlemen. Situasi ini menghambat berkembangnya organisasi perempuan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung kepentingan kaum perempuan. Oleh karena itu, perempuan harus diberi ruang politik yang luas untuk berkembang.

Untuk mendobrak segala keterbatasan tersebut perempuan perlu berusaha untuk mengumpulkan berbagai kekuatan demi memperjuangkan hak politiknya dalam keterlibatan partisipasi politik di pemilihan umum legislatif, yakni salah satunya ialah kekuatan dari partai politik karena salah satu faktor pendukung kemenangan dalam kontestasi pemilihan umum legislatif ialah berasal dari elektabilitas partai politik tersebut di suatu wilayah masyarakat. Semakin besar elektabilitas partai politik di suatu wilayah masyarakat yang dipilih, maka akan semakin besar juga peluang untuk memenangkan kursi legislatif di wilayah tersebut. Namun, perlu diingat juga bahwa masih ada banyak faktor usaha atau kekuatan lain dalam perjuangan untuk memenangkan kontestasi tersebut, seperti modalitas dan strategi.

Partai politik adalah salah satu instrumen dan institusi politik yang penting sebagai alat kelengkapan pemilihan umum legislatif, dalam konteks tersebut partai politik harus melaksanakan sejumlah fungsi. Secara khusus, partai politik menawarkan fungsi perwakilan, dan partai politik menawarkan kepada masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik. Partai politik secara umum diartikan sebagai orang yang berkelompok dan terorganisir yang bertujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan politik dalam masyarakat melalui pemilihan umum. Partai politik yang ikut dalam pemilu kerap bersaing untuk memperebutkan posisi jabatan melalui kursi kepemimpinan (kekuasaan) dengan melakukan berbagai perjuangan serta strategi untuk memenangkannya.

Salah satu partai politik yang sudah terbukti akan kekuatan elektabilitasnya dan mendominasi serta memiliki angka keterlibatan perempuan paling besar di Indonesia adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai yang sering memenangkan kontestasi politik serta memiliki kandidat politik perempuan paling banyak dalam pemilihan umum baik di lembaga eksekutif maupun legislatif dan di tingkat daerah maupun nasional, terkhusus di daerah Ibukota Provinsi DKI Jakarta. Pada pemilihan umum legislatif 2 periode terakhir PDI-P selalu memenangkan perolehan suara dan kursi terbanyak di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pemilihan umum legislatif anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 PDI-P memperoleh jumlah suara yang sah sebanyak 1.231.843 dengan jumlah kursi sebanyak 28 (27%) kursi dari total 106 kursi. Pada pemilu legislatif anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 PDI-P memperoleh jumlah suara yang sah sebanyak 409.721 dengan jumlah kursi sebanyak 25 (24%) kursi dari total 106 kursi.

Selain itu, jika dilihat dari persentase posisi keterlibatan perempuan dalam kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta ialah pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 jumlah dewan perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah 19 perempuan (18%) dari total 106 kursi yang ada, dan partai politik yang memiliki anggota dewan perempuan paling banyak ialah PDI-P dengan rincian sebanyak 10 perempuan (40%) dan 15 laki-laki (60%). Pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 jumlah dewan perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah sebanyak 23 perempuan (21,7%) dari total 106 kursi yang ada, dan partai politik yang memiliki anggota dewan perempuan paling banyak ialah PDI-P dengan rincian sebanyak 11 perempuan (44%) dan 14 laki-laki (56%). Lalu, data persentase jumlah anggota dewan di DPRD Provinsi DKI Jakarta yang terbaru, yakni pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 ialah sebanyak 27 dewan perempuan (25,5%) dan 79 dewan laki-laki (74,5%) di DPRD DKI Jakarta, dan partai politik yang memiliki anggota dewan perempuan paling banyak ialah masih dipegang oleh PDI-P dengan rincian sebanyak 8 (53,3%) dewan perempuan dan 7 dewan laki-laki (46,7%).

Dari kedua fenomena yang telah disertai dengan data dan persentase tersebut menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 3 periode, yakni pada pemilihan umum legislatif tahun 2014, 2019 dan 2024 keterlibatan partisipasi

perempuan di DPRD DKI Provinsi Jakarta belum mencapai 30%. Namun, pada rentang waktu 3 periode tersebut jumlah dewan perempuan di partai politik PDI-P selalu mencapai kuota 30%. Selain itu, PDI-P memang memiliki strategi kemenangan sendiri yang sangat baik yang terorganisir sehingga dapat memperoleh kemenangan kursi legislatif di DPRD Provinsi DKI Jakarta 2 periode berturut-turut dan PDI-P merupakan partai politik yang juga sangat kuat mendukung keterlibatan partisipasi perempuan di bidang politik terutama kedudukan perempuan di dalam parlemen dalam membuat produk kebijakan.

Strategi politik terbagi menjadi dua, yaitu strategi ofensif dan strategi defensif. Strategi ofensif terbagi menjadi strategi perluasan pasar dan strategi untuk menembus pasar, sedangkan strategi defensif meliputi strategi mempertahankan pasar dan menutup pasar (Peter Schroder, 2003). Strategi kemenangan dalam pemilu merupakan cara politis yang terorganisir untuk mengarahkan para pemilih agar memilih kandidat yang mereka inginkan. Sedangkan dalam pandangan Machiavelli, pengertian strategi politik adalah strategi untuk mencapai cita-cita politik. Strategi politik sangat penting tidak hanya bagi para partai politik, tetapi juga bagi organisasi non-pemerintah karena mereka memerlukan strategi untuk mencapai tujuannya. Tentu saja karena alasan politik bukan karena dalam situasi perang, gagasan politik apa pun yang dikemukakan oleh seseorang atau suatu kelompok, sekalipun hanya sekedar bumbu dalam kancah politik, akan memecah belah masyarakat jika diumumkan ke publik. Oleh karena itu, setiap gagasan politik dapat mengubah keadaan, dan dalam setiap keadaan selalu ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan salah satu partai yang sangat menarik untuk diteliti sehingga pada penelitian ini peneliti akan membahas tentang cerita perjuangan politisi perempuan yang berasal dari partai tersebut sebagai bentuk keterlibatan partisipasi perempuan di parlemen, yakni Wa Ode Herlina dan Yuke Yurike sebagai calon legislatif pada pemilu legislatif di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai calon pemimpin atau calon legislatif diharapkan harus membangun citra dirinya yang positif, yakni sebagai pribadi

yang memiliki karakter baik, dapat dipercaya dan untuk bangsa serta negara harus mampu memberikan kesejahteraan nyata kepada para pemilihnya. Oleh karena itu, seorang calon legislatif dalam menyampaikan gagasan, visi, misi, dan program kerja yang jelas diperlukan suatu strategi yang baik, ketika nanti sudah terpilih menjadi seorang anggota legislatif (Faturahman, 2018 dalam Rosyid, 2019).

Berdasarkan temuan Kusuma (2022) dalam Rafsanjani dkk (2023) menyebutkan berdasarkan data yang telah diolah dan dipublikasikan oleh Cakra Wikara Indonesia (CWI) mengenai hasil pemilu, yakni posisi pasangan atau calon dengan nomor urut 1 merupakan nomor urut yang sangat strategis karena berpengaruh besar terhadap faktor keterpilihan dan penentuan nomor urut calon dalam daftar calon masih ditentukan oleh segelintir elit partai. Saat pemilu legislatif periode tahun 2004 hingga 2019 Wa Ode Herlina selalu mendapatkan nomor urut 3. Sedangkan, pada pemilu legislatif tahun 2019 Yuke Yurike mendapatkan nomor urut 2, namun ternyata nomor urut tersebut tidak mempengaruhi faktor keterpilihan dari Wa Ode dan Yuke Yurike secara signifikan.

Tabel 1.1
Track Record Wa Ode Herlina pada Pemilihan Umum Legislatif

Periode	Pencalonan Legislatif	Nomer Urut	Status
Pemilu 2004	DPRD Provinsi DKI Jakarta	3	Gagal terpilih
Pemilu 2009	DPRD Provinsi DKI Jakarta	3	Gagal terpilih
Pemilu 2014	DPRD Provinsi DKI Jakarta	3	Gagal terpilih
Pemilu 2019	DPRD Provinsi DKI Jakarta	3	Berhasil terpilih

Sumber : Olahan Penulis

Tabel 1.2
Track Record Yuke Yurike pada Pemilihan Umum Legislatif

Periode	Pencalonan Legislatif	Nomer Urut	Status
Pemilu 2009	DPR RI	6	Gagal Terpilih
Pemilu 2014	DPRD Provinsi DKI Jakarta	2	Berhasil terpilih
Pemilu 2019	DPRD Provinsi DKI Jakarta	2	Berhasil terpilih

Sumber : Olahan Penulis

Penelitian ini akan menceritakan tentang kisah perjuangan untuk menjadi seorang politisi perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan mencari *struggle for power* apa saja yang dihadapi oleh para politisi perempuan tersebut baik dari segi modalitas, strategi kemenangan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterpilihan dari Wa Ode dan Yuke Yurike selama berjuang menjadi calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pada penelitian terdahulu Indira dan Mariya (2021) dan Gelgel dan Apriani (2019) dalam Rafsanjani dkk (2023) menyebutkan bahwa keterpilihan seorang calon dalam setiap kontestasi pemilihan umum terdapat beberapa faktor pendukung terutama pada aspek modalitas, yaitu kuat dan lemahnya kepemilikan antara modal ekonomi, sosial, dan politik, atau unsur-unsur modal (secara kumulatif atau paling sedikit salah satunya). Studi komparatif politisi dalam strategi kemenangan kontestasi pemilu legislatif sudah dilakukan oleh Rosyid (2019), namun kasusnya pada caleg di partai dan provinsi yang berbeda. Studi tersebut menemukan bahwa strategi yang digunakan oleh para caleg adalah *marketing* politik dengan metode *positioning, policy, party, dan presentation* (4P). Dalam menerapkan keempat metode strategi tersebut, calon anggota legislatif terlebih dahulu menentukan target daerah kemenangan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing yang disebut dengan strategi pemasaran terpusat. Oleh karena itu, peneliti melihat adanya urgensi penelitian serupa untuk calon anggota legislatif di partai dan provinsi yang belum dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *struggle for power* yang dihadapi dari segi modalitas, strategi kemenangan dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kemenangan politisi perempuan Wa Ode Herlina dan Yuke Yurike di DPRD Provinsi DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas, meliputi :

1. Untuk menganalisis tentang *struggle for power* yang dihadapi dari segi modalitas, strategi kemenangan dan menemukan faktor-faktor lain yang memengaruhi kemenangan politisi perempuan Wa Ode Herlina dan Yuke Yurike di DPRD Provinsi DKI Jakarta

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian diatas, meliputi :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi peminatan studi pemilu dan politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi kepada para perempuan untuk maju sebagai calon legislatif pemilu.
2. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi kepada masyarakat untuk terjun dalam kontestasi politik tanpa mempertimbangkan kekalahan atau kemenangan
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi partai politik dalam pencalonan perempuan di pemilu.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu oleh Thufail (2025) tentang “Dibalik Kekalahan Caleg Perempuan Tetap Nyaleg : Studi Fenomenologis Caleg Kalah dalam PILEG”. Penelitian ini menemukan beberapa alasan atau faktor caleg dalam menyalonkan diri meski telah mengalami beberapa kegagalan diantaranya karena memiliki pengalaman yang menyulitkan sebagai warga sipil, menjalankan tugas dari internal partai, dan pemahaman peran serta fungsi seorang legislator sebagai wakil rakyat untuk membantu masyarakat.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Abdulrahman (2015) tentang “Kegagalan Caleg Petahana dalam PILEG DPRD Jawa Tengah 2014”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa motivasi yang menjadi latar belakang menyalonkan diri sebagai caleg. Pertama, peneliti menemukan adanya motivasi dari aspek internal partai, yakni sebagai kader harus siap ketika ditugaskan oleh internal partai termasuk ke dalam pencalonan. Kedua, motivasi lain karena didukung oleh kesempatan, usia dan kesehatan yang diberikan. Ketiga, motivasi yang paling utama adalah karena keinginan caleg untuk kembali membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Sikap politik caleg berupa keputusan caleg untuk kembali menyalonkan diri pada pemilu legislatif setelah mengalami beberapa kegagalan mayoritas dilatarbelakangi oleh faktor psikologis, yakni berdasarkan keyakinan politik (*political belief*) yang dimiliki oleh caleg. Keyakinan politik meliputi pemahaman atas nilai, sikap, serta peran sebagai caleg di masyarakat yang bersumber dari pengalaman politik serta kegagalan caleg tersebut.

Penelitian terdahulu tentang perilaku memilih telah dilakukan oleh Deborahana (2019) tentang “Perilaku Pemilih Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif di Desa Sahan Kecamatan Seluas Dapil 2

Kabupaten Bengkayang Tahun 2019”. Penelitian ini menemukan beberapa pendekatan yang memengaruhi terbentuknya perilaku memilih, yakni pendekatan sosiologis, pendekatan ekologis, dan pendekatan rasional. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang cenderung dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama seseorang caleg. Pendekatan ekologis, pendekatan yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, wawasan dan nilai-nilai politik yang membentuk perilaku politik masyarakat dari perolehan data atau informasi dari lingkungan sekitar masyarakat. Pendekatan rasional merupakan pendekatan yang dipengaruhi oleh pemikiran untung-rugi masyarakat dalam memilih caleg tersebut.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Prasadana (2013) tentang “Perilaku Memilih Masyarakat Kecamatan Pinang Pada Pilkada Walikota Tangerang 2013”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku memilih masyarakat kecamatan Pinang mayoritas dipengaruhi oleh pendekatan sosiologis. Memilih dengan pendekatan sosiologis adalah perilaku yang menilai sosok pemimpin berdasarkan latar belakang agama, suku, ras atau wilayah.

Temuan lain juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aditama (2013) tentang “Perilaku Memilih Masyarakat pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal 2010” penelitian ini menemukan bahwa faktor kandidat atau figur calon memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku memilih. Memilih menilai kandidat melalui citra yang dibangun di masyarakat. Selanjutnya, faktor dari visi misi calon juga dapat memengaruhi perilaku memilih tersebut selain dari faktor kesamaan agama.

Pada penelitian terdahulu mayoritas membahas perilaku memilih dalam pilihan politik terhadap caleg dalam pemilu secara umum serta melalui pendekatan sosiologis, ekologis, dan psikologis seperti tindakan rasional memilih caleg.

Kemudian, pada penelitian terdahulu tentang modalitas sebagai faktor non-psikologis keterpilihan caleg telah dilakukan oleh Rafsanjani dkk (2023) tentang “Daya Juang dan Daya Tangguh Politisi Perempuan dalam Pemenangan Pemilu (Studi Kasus Keterpilihan Tiga Periode Politisi Partai Amanat Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah)” penelitian ini menemukan beberapa modalitas sebagai faktor keterpilihan salah satu politisi Partai Amanat Nasional di DPRD Provinsi Jawa Tengah, yakni Sri Maryuni. Modalitas yang paling dominan dimiliki oleh Sri Maryuni adalah modal sosial karena Sri Maryuni kerap melakukan perawatan terhadap konstituen partai dan masyarakat, sehingga Sri Maryuni memiliki jaringan sosial yang luas dan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Sri Maryuni. Selain itu, terdapat dua modalitas pendukung lainnya seperti modal ekonomi dan modal budaya. Modal ekonomi yang dipakai Sri Maryuni tidak melebihi batas kemampuan ekonomi yang dimilikinya atau dalam artian semampunya saja dan lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan *public goods* daripada kepentingan kampanye pribadi. Sedangkan, modal budaya terbesar yang dimiliki Sri Maryuni bukanlah berasal dari gelar dan latar belakang pendidikannya melainkan berasal dari latar belakang akademis, yakni pengalaman selama pendidikan dan latar belakang kepribadian Sri Maryuni serta keluarganya sehari-hari di lingkungan sekitar.

Modalitas lain sebagai faktor keterpilihan pada studi kasus kepala daerah Kabupaten dilakukan oleh Firmansyah dan Faradhila (2022) tentang “Modal Politik Kandidat Perempuan dalam Pemilihan Umum Studi Kasus Dewi Noviany dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020”. Penelitian tersebut menunjukkan modalitas yang paling dominan sebagai faktor keterpilihan Dewi Noviany sebagai wakil bupati adalah modal politik dibandingkan dengan modal lainnya. Dewi Noviany memiliki modal politik, yakni

yang pertama berupa dukungan dari partai politik, diantaranya berasal dari partai pengusung, partai pendukung dan gabungan partai lainnya (koalisi partai). Selain itu, dengan status petahana (*incumbent*) yang dimiliki pasangan kandidatnya dengan menggunakan jaringan yang telah terbangun pada periode sebelumnya akan semakin berpengaruh pada peluang dan kesempatan untuk memenangkan kontestasi tersebut. Modal politik kedua adalah adanya hubungan dengan elit-elit politik lokal, diketahui bahwa Dewi Noviany merupakan adik kandung dari mantan Gubernur Sumbawa periode tahun 2018, yaitu Dr. H Zulkieflimansyah. Hal tersebut tentu memberikan pengaruh terhadap kekuatan dukungan pada posisi Dewi Noviany karena adanya hubungan turunan atau kekerabatan sebagai bentuk dari hubungan patronase. Keuntungan dari besarnya modal politik yang dimilikinya membawa hasil akhir kepada Dewi Noviany dengan memenangkan kontestasi politik tersebut.

Strategi kemenangan juga menjadi aspek yang sangat penting sebagai faktor keterpilihan pada studi kasus calon anggota legislatif dalam temuan Firmansyah dkk (2022) tentang ” Strategi Kemenangan Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019”. Mereka mengatakan bahwa strategi kemenangan yang dilakukan para kandidat sama seperti strategi pada umumnya yang dilakukan oleh kandidat lain. Mereka juga menyebutkan bahwa kontestasi politik, yaitu pemilu dapat diibaratkan sebagai suatu pasar (*market*) yang dimana terdiri dari adanya permintaan dan penawaran serta kesediaan dari suatu produk. Para kandidat diidentifikasi sebagai produk pasar atau produk politik dalam konteks pemilu. Oleh karena itu, membutuhkan suatu strategi agar produk tersebut dapat laku keras di pasaran. Strategi pertama ialah menggunakan strategi pemasaran politik (*political marketing*) yang diantaranya membutuhkan tim kemenangan atau bisa disebut dengan “sales politik”, Selanjutnya para sales ini akan melakukan promosi

dengan berbagai pesan politik yang telah ditentukan yang bertujuan untuk membranding produk tersebut di pasaran. Selain itu, pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua bentuk strategi politik: strategi ofensif dan strategi defensif. Dalam studi kasus ini, para kandidat lebih banyak menggunakan strategi politik ofensif dibandingkan dengan strategi defensif. Strategi ofensif yang digunakan, yakni berupa turun langsung ke lapangan dengan metode *door to door*, membawa isu-isu perempuan di dalam politik, dan kampanye dengan memasang baliho maupun spanduk. Strategi ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan atau suara sebanyak-banyaknya dengan memperluas jangkauan target pemilih dan memperluas jaringan (*networking*).

Penelitian serupa lainnya juga dilakukan oleh Ningrum dan Sunarso (2018) tentang “Strategi Pemenangan dan *Marketing* Politik Pasangan Budhi Sarwono dan Syamsudin Pada Pilkada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017”. Pada penelitian ini ditemukan bahwa strategi pemenangan yang paling dominan atas terpilihnya Budhi Sarwono dan Syamsudin pada Pilkada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 adalah strategi bentuk ofensif. Bentuk strategi ofensif yang dilakukan antara lain, yakni survei lapangan langsung, membangun koalisi partai, memperluas jaringan atau daerah dengan metode pemetaan, kampanye dengan metode simpatik, mengenal lawan lebih dekat dengan metode analisis SWOT, dan promosi dengan metode *marketing* politik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan, maka cerita perjuangan politisi dengan berbagai aspek modalitas dan strategi keterpilihan dengan pendekatan psikologi dan etnografi politik menjadi faktor yang akan digunakan untuk menjelaskan keterpilihan Wa Ode dan Yuke Yurike di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini fokus pada faktor yang berperan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Psikologi Politik dalam Pemilihan Umum

Pada dasarnya, psikologi politik menggabungkan dua bidang keilmuan: ilmu psikologi dan ilmu politik, meskipun bidang keilmuan lain juga berkontribusi terhadap literatur dan pengembangan bidang keilmuan ini. Psikologi politik dapat digambarkan sebagai kombinasi berbagai disiplin ilmu (Cottam, Diez-Uhler, Mastosr & Preston, 2004: 3). Psikologi politik pada dasarnya bukan turunan dari ilmu psikologis, melainkan hasil dari perkawinan antara ilmu psikologi dengan ilmu politik (Deutsch & Kinvall, 2001). Oleh karena itu, kedua ilmu tersebut saling memengaruhi seperti dalam proses psikologi memengaruhi proses politik dan begitu sebaliknya. Untuk menguasai psikologi politik secara utuh, di satu sisi harus mengetahui dunia politik, baik teori maupun praktiknya, dan di sisi lain harus mengetahui psikologi dengan baik (Tjost & Sidanius, 2004: 3). Pada dasarnya psikologi politik berkaitan dengan emosi, perilaku, dan pemikiran dalam bidang ilmu politik. Pada awalnya psikologi politik ditujukan untuk mempelajari kepribadian dan sikap politik para pemimpin politik, namun sejak itu bidang psikologi politik mengalami perkembangan yang sangat pesat dan dramatis (Marcus, 2002: 15). Teori psikologi politik didukung oleh penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan tidak hanya kepribadian dan sikap tetapi juga peran kognisi dan emosi dalam sikap dan perilaku politik, ideologi politik, dan hubungan kekuasaan antar kelompok.

Psikologi politik merupakan cara memahami peristiwa atau perilaku politik dalam perspektif psikologi melalui faktor-faktor sosio-psikologis (sikap, keyakinan, nilai personal, kelompok, emosi, identitas, sikap awal). Berdasarkan sejarah perkembangannya terdapat beberapa topik penelitian di dalam psikologi politik, yakni kepribadian tokoh politik (1940-1950), sikap politik dan perilaku memilih (1960-1970), kognisi politik, keyakinan politik, pemrosesan informasi dan pengambilan

keputusan (1980). Contoh topik penelitian nyata psikologi politik di masyarakat antara lain kajian tentang perilaku memilih politik, alasan terjadinya demonstrasi mahasiswa, tindakan korupsi, perilaku anggota partai, dan bagaimana kepribadian seorang presiden mempengaruhi politik nasional. Psikologi politik juga mempelajari perilaku masyarakat yang tidak mau membayar pajak karena tidak percaya pada pemerintah. Selain itu, kajian mengenai terorisme juga merupakan bagian dari psikologi politik, karena pelakunya ingin mendirikan negaranya sendiri dan membujuk kelompok yang tidak percaya pada negara tersebut. Selain itu, persoalan perilaku manusia dalam konteks bernegara dan berbangsa pada hakikatnya termasuk dalam bidang psikologi politik (Hamdi, 2024).

Topik penelitian psikologi politik dalam konteks pemilihan umum (pemilu) diantaranya mengenai sikap politik politisi dan perilaku memilih. Konteks psikologi politik dalam sikap politik politisi membahas mengenai faktor-faktor psikologis yang berdampak terhadap perilaku dan keputusan politisi tersebut, seperti kepribadian, emosi, dan kognisi. Psikologi politik juga berperan terhadap pemahaman tentang bagaimana sikap politik terbentuk dan bagaimana hal tersebut berdampak pada interaksi dengan publik serta pengambilan keputusan politik.

Terdapat tiga asumsi yang mendasari terbentuknya sikap politik politisi (Josh & Sidanius. 2004). Pertama, secara implisit sikap politik seorang politisi memiliki tujuan untuk kepentingan pribadi (*self-interest*), sehingga dalam proses pengambilan keputusan bersifat subjektif. Kedua, sikap politik seorang politisi bersumber dari keyakinan politik (*political belief*) yang dipercaya, sehingga dapat memengaruhi kognisi, afeksi dan perilaku politisi. Ketiga, sikap politik seorang politisi juga bisa dilatarbelakangi oleh homogenitas kelompok sendiri (*ingroup*

homogeneity) melalui nilai, sikap, dan perilaku kelompok, sehingga bertujuan untuk memprioritaskan kepentingan kelompok.

Perilaku memilih dalam psikologi politik bersifat sangat dinamis karena selalu berkembang mengikuti kondisi zaman. Perilaku memilih atau disebut dengan voting dan pelaku memilih disebut dengan voters dalam bahasa Inggris, merupakan salah satu aspek yang pasti ada dalam penyelenggaraan pemilu. Perilaku memilih muncul sebagai bentuk partisipasi politik warga negara dalam demokrasi. Dalam perilaku memilih memiliki dua topik yang dibahas, yakni partisipasi politik dan pilihan politik. Topik pilihan politik membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi hasil akhir pilihan kepada seorang kandidat.

Perilaku memilih dalam konteks pilihan politik cenderung memilih berdasarkan beberapa identifikasi terhadap para politisi. Terdapat tiga pendekatan yang menjadi faktor terbentuknya perilaku memilih dalam pilihan politik, sebagai berikut:

1. Pendekatan sosiologis (Lazarsfeld, dkk. 1954): Berdasarkan status sosial & ekonomi, komunitas agama, lokasi perumahan (homogenitas politik) dan interaksi personal.
2. Pendekatan politik (Campbell, dkk. 1954, 1960, 1966): Berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap politisi atau partai politik (kinerja politisi atau partai politik).
3. Pendekatan kognisi (Houghton. 2009): Berdasarkan keyakinan personal melalui pengolahan informasi yang diterima terhadap politisi melalui media daring (kemampuan berbicara, kemampuan memimpin, kemampuan ekonomi).

Selain itu, secara spesifik melalui pendekatan psikologis dalam pilihan politik menurut Downs (1957) dalam *The Rational Voter Models* menyebutkan bahwa keputusan untuk memilih didasarkan dengan faktor

yang rasional, seperti para pemilih akan memilih kandidat yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan paling besar. Pemilih cenderung akan mengevaluasi dan membandingkan antar kandidat sebelum memutuskan, seperti dari segi kinerja, status petahana, dan lainnya. Kinder & Kiewit (1981) juga menyebutkan bahwa dalam *The Rational Voter Models* terdapat dua perhatian utama yang menjadi landasan tujuan memilih, yakni kandidat mana yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi (*economic voting*) dan kesejahteraan masyarakat (*sociotropic voting*) lebih besar kedepannya.

1.6.2 Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum

Menurut Budiarjo (2008: 367), partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara dan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung atau tidak langsung. Contoh kegiatan ini termasuk berpartisipasi dalam gerakan sosial atau partai politik secara langsung, menghadiri rapat umum, menjalin hubungan atau melakukan lobi dengan anggota parlemen atau pejabat pemerintah, dan sebagainya. Herbert Mc Cloksy (Budiarjo, 2008: 367) menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh warga secara sukarela yang melibatkan mereka dalam proses pembuatan kebijakan umum dan dalam pemilihan penguasa.

Partisipasi politik perempuan merupakan suatu kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung membentuk suatu komunitas politik perempuan yang terdiri dari berbagai unsur seperti aktivis, pengamat politik, pengajar, kader partai politik dan sebagainya. Sehingga, dalam komunitas tersebut kaum perempuan dapat mengambil peran dalam proses pembuatan kebijakan publik (Sri Warjiyati, 2016).

Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi sudah seharusnya mengedepankan asas kepentingan rakyat sebagaimana dari

arti demokrasi itu sendiri, yakni “dari rakyat, dan untuk rakyat”. Untuk mencapai kepentingan tersebut memerlukan adanya keterwakilan rakyat dalam proses penyelenggaraan tatanan pemerintahan negara. Pemilihan umum hadir sebagai representasi keterwakilan rakyat Indonesia dalam demokrasi. Partisipasi politik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan politik di suatu negara yang demokrasi (Sahid, 2011). Pada pemilihan umum seluruh masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung. Pemilihan umum memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi sebagai wakil rakyat tanpa adanya suatu diskriminasi terhadap suku, ras, agama, dan gender.

Secara historis budaya, Indonesia merupakan negara yang menganut nilai patriakal sejak masa kolonialisme. Menurut Saptari (1997) nilai patriakal dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang diatur oleh laki-laki melalui institusi sosial, politik, ekonomi, dan agama. Sistem ini bersifat hierarkis, agresif, dan muncul secara independen dari perubahan sosial, seperti sistem kapitalisme yang membagi sektor domestik dan publik. Sistem ini memungkinkan laki-laki menjadi lebih dominan di sektor publik dibandingkan dengan Perempuan (Gamble, 2010). Oleh karena itu, budaya yang telah mengakar sejak masa lampau tersebut menjadi salah satu hambatan untuk merealisasikan partisipasi perempuan dalam hak-hak politiknya.

Pada tahun 1955 atau orde lama pemilu dilaksanakan secara demokratis yang didasarkan atas kemampuan individu setiap caleg, sehingga partisipasi perempuan mengalami peningkatan. Namun, pada masa orde baru pemilu dilaksanakan berdasarkan kepentingan elit politik saja sehingga partisipasi perempuan dalam politik mengalami penurunan.

Sebagai bentuk kompensasi atas diskriminasi terhadap nasib kaum perempuan yang telah terjadi selama ini, sudah seharusnya pemerintah membuat suatu kebijakan yang bersifat afirmatif (*affirmative action*).

Akhirnya, Indonesia untuk pertama kalinya mengeluarkan suatu kebijakan tentang partisipasi perempuan dalam politik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 65 yang mewajibkan seluruh partai politik peserta pemilu untuk memenuhi kuota 30% perempuan dalam daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga, pada pemilu tahun 2004 partisipasi perempuan dalam politik kembali mengalami peningkatan.

Kebijakan tersebut lahir dilatarbelakangi oleh Konferensi Perempuan Dunia di Program Aksi Beijing tahun 1995 yang diberi nama "*Women in Power and Decision Making*". Adapun beberapa keputusan penting dari konferensi tersebut menurut UNDP (2013) sebagai berikut:

- 1) Membuat agenda yang jelas untuk mengakhiri semua perilaku diskriminasi hukum terhadap perempuan (menurut paduan CEDAW) dan membangun kerangka kerja untuk memajukan kesetaraan hukum
- 2) Memulai langkah-langkah khusus dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai 30% posisi pembuat keputusan di tingkat nasional dan 50% posisi pembuat keputusan di tingkat internasional
- 3) Menggerakkan upaya di tingkat nasional dan internasional untuk memfasilitasi akses yang lebih besar bagi perempuan bidang tertentu.

Oleh karena itu, kebijakan tentang partisipasi perempuan dalam lembaga pembuat kebijakan publik (legislatif) dengan kuota sebesar 30% berasal dari sisi historis tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk diskriminasi dan menjamin kesetaraan bagi partisipasi aktif perempuan dalam struktur politik negara.

1.6.3 *Struggle for Power* Politisi Perempuan dalam Pemilihan Umum

Struggle for power menurut Wolfensberger (2011) ialah “*the struggle for power in order to influence policy, and to determine how resources are allocated*” (perebutan kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan, dan untuk menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan). *Struggle for power* dapat diartikan sebagai inti dari tujuan kegiatan politik, yaitu suatu upaya untuk memperoleh kekuasaan. Dampak dari adanya *struggle for power* tersebut ialah menimbulkan pertentangan (*contention*), tindakan memperebutkan sesuatu (*contestation*) dan persaingan (*competition*). Salah satu penyebab dari dampak tersebut ialah ketidakseimbangan antara jumlah kekuasaan dan sumber daya yang diperebutkan dengan jumlah pihak-pihak yang memperebutkannya. *Struggle for power* sendiri sangat berkaitan erat dengan pemilihan umum di Indonesia. Dalam konteks pemilihan umum, para kontestan politik berjuang untuk memenangkan suatu kekuasaan yang diinginkan (eksekutif dan legislatif). Oleh karena itu, pada pelaksanaan pemilihan umum kerap terjadi suatu pertentangan, perebutan, dan persaingan kekuasaan antar kandidat politik. Namun, perlu diingat bahwa sebagai peserta kontestasi pemilihan umum memerlukan banyak upaya yang harus dipersiapkan dalam mengikuti kontestasi tersebut mulai dari niat serta semangat yang besar, mental individu yang kuat, waktu yang tidak sedikit, modal dan strategi yang tepat dalam berjuang untuk memenangkan kontestasi politik tersebut.

Modal merupakan hal yang vital dalam kontestasi politik. Penggunaan modal dalam pemilihan umum dapat menjadikan setiap kandidat yang bertarung dalam kontestasi politik mempunyai kesempatan yang sama karena kepemilikan modal yang berbeda antara satu calon kandidat dengan yang calon kandidat lain (Baharuddin dan Purwaningsih, 2017). Sumber-sumber yang dapat menjadi sebuah kekuatan seseorang yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan posisi di masyarakat sehingga menunjukkan keanggotaan

dalam kelas sosial masyarakat secara jelas merupakan definisi dari modal (Bourdieu, 1986 dalam Rafsanjani, 2023). Buku *The Form of Capital* menjelaskan bahwa modal terbagi atas tiga jenis yang terbagi atas ranah yang berbeda satu sama lain, yaitu modal budaya, modal sosial, dan modal ekonomi (Bourdieu, 1986). Baharuddin dan Purwaningsih (2017) menyatakan terdapat jenis modal lain yakni modal politik yang perlu dimiliki oleh setiap calon kandidat dan menambahkan bahwa seorang calon kandidat mempunyai peluang yang lebih besar untuk terpilih dalam kontestasi politik apabila mempunyai akumulasi modal lebih dari satu jenis, seorang calon kandidat yang mempunyai akumulasi modal sebanyak tiga jenis akan mempunyai peluang terpilih lebih tinggi dibandingkan seorang calon kandidat yang hanya mempunyai akumulasi modal dari dua jenis saja.

Modal budaya yang dimiliki seorang calon kandidat merupakan modal yang dimiliki seseorang yang didapatkan melalui pembentukan yang diturunkan dari orang tua dan lingkungan, maka modal budaya mempunyai sifat multidimensional (Baharuddin dan Purwaningsih, 2017). Menurut Malasari dan Putra (2020) modal budaya dapat ditunjukkan melalui segi cara bicara, kemampuan dalam menulis, sikap sopan santun, cara bergaul, ijazah yang dimiliki, dan hal lain yang sejenis. Baharuddin dan Purwaningsih (2017) menyatakan beberapa dimensi di dalam modal budaya antara lain:

1. Wawasan dan pemahaman *cultural and art* secara objektif
2. Preferensi personal tentang *cultural taste*
3. Gelar Universitas atau pangkat tertentu
4. Pengetahuan *practical* dan keahlian tentang budaya.
5. Pemahaman mengenai etika, dan moral.

Modal sosial dapat dijelaskan sebagai kumpulan dari relasi sosial yang dimiliki seorang calon kandidat yang kemudian menjadi jaringan sosial yang dapat terbagi menjadi jaringan partai atau jaringan non partai, jaringan keluarga, kekuatan pengaruh dalam masyarakat, dan

kepengurusan di dalam organisasi (Ramadhani dan Rahmawati, 2020). Pengertian lain dari modal sosial adalah sebuah sumber daya yang dimiliki seorang calon kandidat politik berupa jaringan yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antar anggota yang terinstitusionalisasikan (Field, 2003). Modal sosial memerlukan *mutual trust* antar anggota dalam sebuah kelompok (Putnam, 1993), maka berdasarkan pendapat-pendapat yang ada dapat dikatakan bahwa modal sosial merupakan modal yang dimiliki seorang calon kandidat berupa kepemilikan jaringan sosial yang dipengaruhi oleh kepercayaan sehingga dapat terbentuk hubungan timbal balik antar aktor.

Field (2003) dalam Rafsanjani (2023) menyatakan bahwa modal ekonomi merupakan akar dari setiap modal-modal yang bermain dalam kepemilikan modal calon kandidat kontestasi politik dan dijelaskan bahwa kekuatan secara finansial yang dimiliki setiap calon kandidat dalam kontestasi politik merupakan pemahaman mengenai modal ekonomi oleh Field. Modal ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai ‘penggerak’ terhadap mesin politik yang digunakan setiap kandidat dalam kontestasi politik (Baharuddin dan Purwaningsih, 2017). Modal ekonomi diperlukan seorang calon kandidat dalam kontestasi politik karena proses politik di Indonesia banyak membutuhkan biaya politik yang mahal (Sahdan dan Haboddin, 2009).

Selanjutnya mengenai strategi kemenangan politik, pada dasarnya strategi adalah rencana dalam jangka panjang yang diikuti oleh tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu (Putri, 2017). Sedangkan, strategi politik sendiri dapat didefinisikan sebagai rencana-rencana yang tersusun dan terdapat tindakan yang terukur untuk memenangkan kontestasi politik (Prihatmoko, 2008). Secara spesifik, Schroder (2008) menjelaskan bahwa strategi politik merupakan strategi yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan cita-cita politik yang mengarah pada perolehan kekuasaan, karena tanpa

adanya strategi politik maka upaya untuk mendapatkan kekuasaan akan sulit dan untuk mewujudkan cita-cita politik juga menjadi sulit, sehingga strategi politik berujung pada kekuasaan yang didapatkan kemudian dapat digunakan untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik untuk perubahan sosial.

Pada penelitian ini, topik yang ingin dibahas oleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teori Peter Schroder (2008) tentang teori strategi politik dalam kontestasi politik. Terdapat dua bentuk strategi politik yang digunakan untuk kontestasi politik, yakni strategi ofensif dan strategi defensif. Strategi ofensif adalah strategi memperluas dan menembus pasar politik. Dengan kata lain, strategi ofensif merupakan suatu teori yang dapat menjelaskan bagaimana setiap kandidat politik menentukan pilihan dan melakukan gerakan politik karena strategi ini merupakan bagian dari upaya untuk memenangkan suara di semua kelas pemilih yang bertujuan untuk mempertahankan suara basis atau mendapatkan basis lawan. Bentuk kegiatan politik dari strategi ofensif dalam pemilu seperti pemetaan (*mapping*), penjaringan (*networking*), berbagai jenis kampanye dan lainnya.

Sedangkan, strategi defensif adalah strategi yang bertujuan untuk melindungi pasar, dan strategi untuk menutup atau menyerahkan pasar politik. Adapun bentuk kegiatan politik dari strategi defensif berupa segala jenis usaha untuk merawat konstituen atau basis pemilihnya seperti, menjaga komunikasi yang intens, menjaga tali silaturahmi dengan jaringan atau mitra kerja yang telah terbentuk, menjaga hasil kinerja nyata di lingkungan masyarakat, pengawalan suara dan lainnya. Mayoritas para caleg mengutamakan untuk menggunakan strategi ofensif dibandingkan dengan strategi defensif karena dinilai lebih efektif terhadap kemenangan para caleg tersebut.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Penerapan konseptual dari teori sikap politik politisi dan perilaku memilih, menurut John & Jim Sidanius (2004) dalam Buku “*Political Psychology*”.

Tabel 1.3
Indikator Sikap Politik Politisi menurut John & Jim Sidanius (2004)

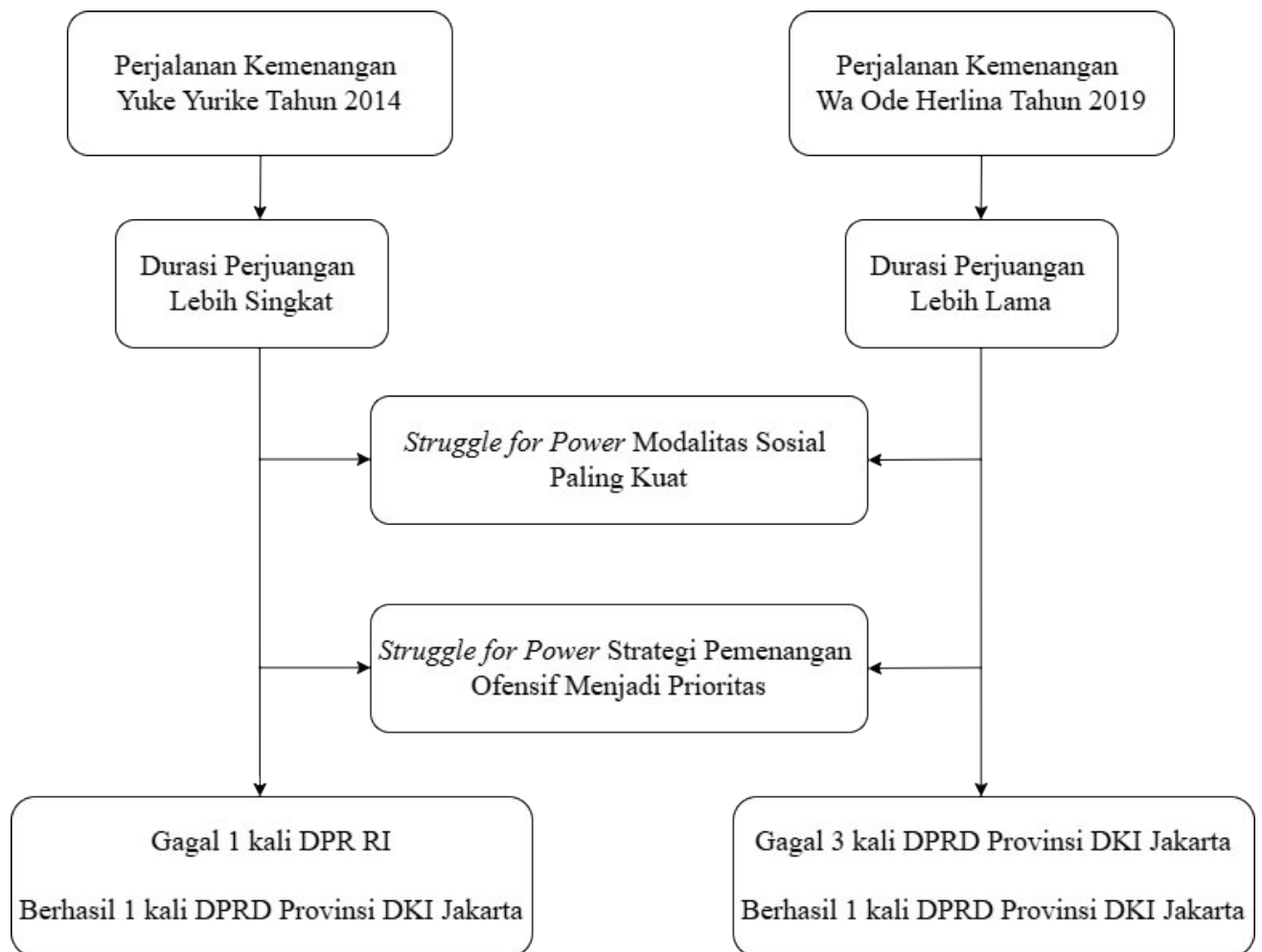
NO.	INDIKATOR	KETERANGAN
1.	Kepentingan Pribadi (<i>Self-Interest</i>)	Pengambilan keputusan bersumber dari kebutuhan diri sendiri atau bersifat subjektif.
2.	Keyakinan Politik (<i>Political Belief</i>)	Pengambilan keputusan bersumber dari keyakinan atau kognisi yang memengaruhi afeksi dan perilaku.
3.	Kepentingan Kelompok (<i>Ingroup Homogeneity</i>)	Pengambilan keputusan bersumber dari kebutuhan homogenitas kelompok.

Tabel 1.4
Indikator Pendekatan Perilaku Memilih

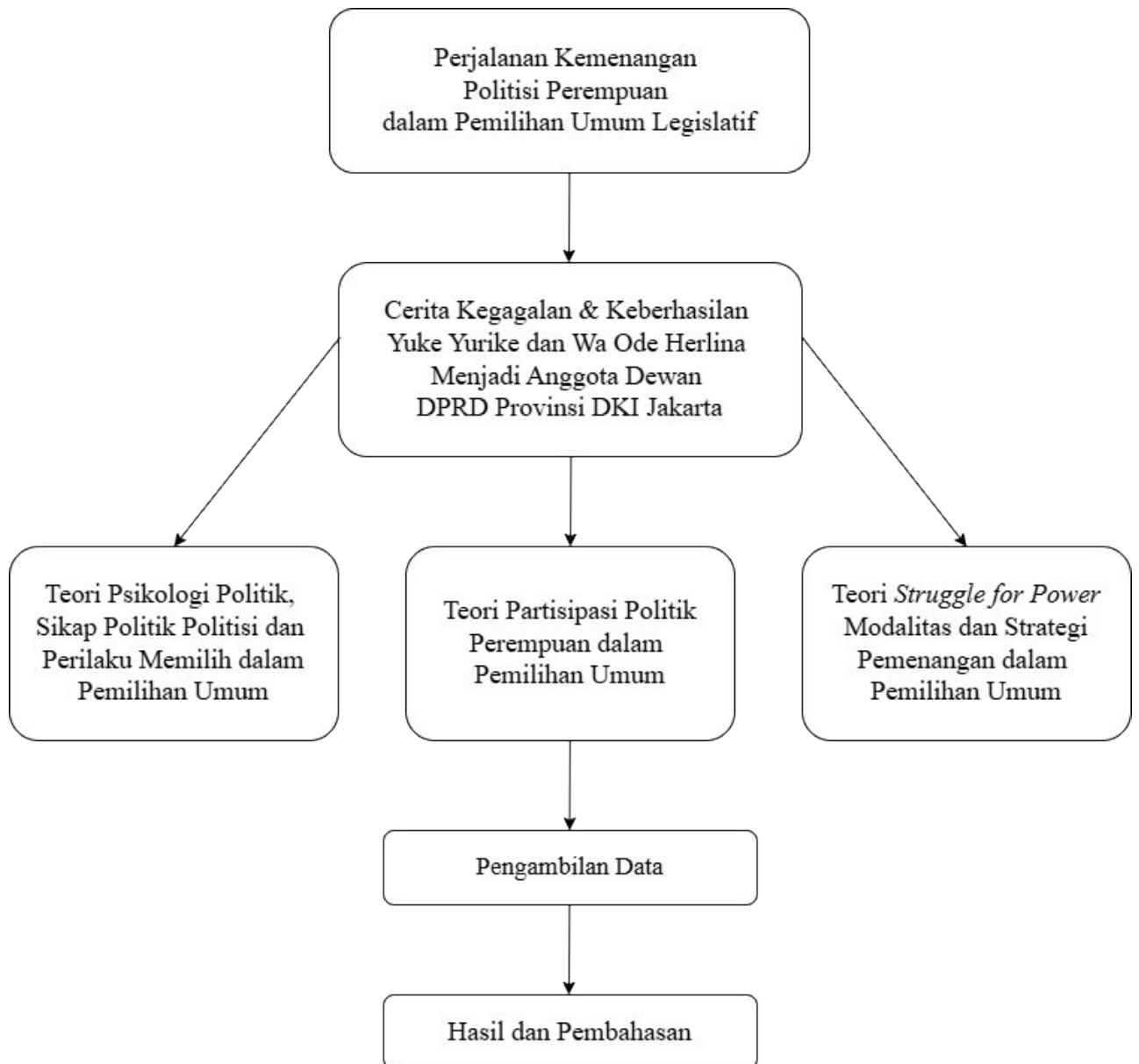
NO.	INDIKATOR PENDEKATAN	PARAMETER
1.	Pendekatan Politik (Lazarsfeld, dkk. 1954)	Kandidat politik dan partai politik.
2.	Pendekatan Sosiologis (Campbell, dkk. 1954, 1960, 1966)	Status sosial-ekonomi, daerah perumahan, interaksi personal, emosional, identitas (agama, gender, dll).
3.	Pendekatan Kognisi (Houghton, 2009)	Kognitif personal (pengolahan informasi, perspektif, pengetahuan, dan pengambilan keputusan).
4.	Pendekatan Rasional (Downs, 1957)	Rasionalisasi untung-rugi terhadap kandidat politik.

Penerapan konseptual dari teori *struggle for power* modalitas dan strategi pemenangan politisi dalam pemilihan umum legislatif.

Bagan 1.1
Peta Konsep Relasi antara *Struggle for Power* Modalitas dan Strategi Pemenangan Yuke Yurike dan Wa Ode Herlina.



1.8 Kerangka Berpikir



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian, yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk penelitian ini. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang bertujuan untuk menarasikan sebuah kondisi atau fenomena secara komprehensif sehingga tulisan yang dibuat bersifat deskriptif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif menjadikan peneliti memerlukan teknik wawancara dalam proses pengumpulan data untuk mendapatkan data yang mendalam. Untuk membentuk penelitian yang lebih mendalam maka peneliti akan mencari dan menggunakan data tertulis atau tidak tertulis sebagai referensi tambahan.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti mengenai masalah sosial, situasi atau fenomena sosial, tingkah laku masyarakat atau individu, dan masyarakat atau individu itu sendiri. Penelitian kualitatif menjadi bentuk penelitian yang mendorong peneliti memperdalam penelitian terkait masalah atau fenomena yang terjadi di sebuah kelompok tertentu atau individu tertentu (Creswell, 2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan sebuah fakta berdasarkan kondisi yang terdapat di lapangan dari objek atau subjek yang diteliti.

Pendekatan etnografi memperoleh data-data melalui metode observasi partisipatif, wawancara mendalam dan lampiran dokumentasi. Observasi partisipatif ialah dengan pendekatan langsung bersama informan dan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan informan (Ahimsa Putra, 2007). Metode wawancara dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan seperti sapaan, keterbukaan, penghindaran pengulangan, dan pengendalian pembicaraan (Spradley, 1997). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang dokumen tertulis seperti buku, artikel, surat kabar, novel, buku harian,

biografi, otobiografi, data statistik, dan sebagainya selama melakukan penelitian (Davies, 1998).

1.9.2 Situs dan Subjek Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Wa Ode dan Yuke Yurike.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta dengan wilayah yang lebih spesifik berada pada DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dapil 1 yakni Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Dapil 8 yakni Kota Administrasi Jakarta Selatan. Situs lain yang menjadi bahan dalam penelitian ini ialah tempat dari informan yang bersangkutan. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Wa Ode dan Yuke Yurike.

1.9.3 Informan Penelitian

Penelitian ini akan melibatkan beberapa pihak yang akan menjadi informan pada penelitian ini.

1. Wa Ode
2. Yuke Yurike
3. Tim sukses Wa Ode
4. Tim sukses Yuke Yurike
5. Pengurus DPC PDI-P Jakarta Pusat
6. Pengurus DPC PDI-P Jakarta Selatan
7. Pemilih di Dapil 1 Wa Ode
8. Pemilih di Dapil 8 Yuke Yurike

1.9.4 Jenis dan Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data. Data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pendukung.

1. Data Primer

Data primer dijelaskan sebagai data yang ditemui langsung berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, untuk mendapatkan data primer, dapat melalui teknik wawancara ataupun observasi

(Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan wawancara untuk mendapatkan data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia. Bentuk dari data sekunder pada umumnya berbentuk berkas, dokumen, catatan dan data lainnya yang dapat digunakan peneliti untuk diolah dan dianalisis (Hasan, 2002). Penelitian ini menggunakan data sekunder dari jurnal, dokumen, berita dari media cetak maupun *online* yang relevan.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun peneliti disini menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka sebagai teknik yang digunakan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang mempunyai tujuan tertentu oleh dua pihak, yakni pihak pewawancara sebagai pihak yang memberikan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai sebagai pihak yang menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh pewawancara (Basrowi & Suwandi, 2008). Dalam teknik wawancara, terdapat tahapan yang menjadikan tahapan tersebut merupakan ciri khusus yang dimiliki teknik wawancara yakni berupa komunikasi secara langsung antara pihak yang mencari informasi dengan pihak yang memberikan informasi. Sehingga di dalam teknik wawancara terdapat tahapan tanya jawab untuk mendapatkan informasi sebagai data untuk penelitian.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*In-depth interview*) merupakan proses memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian melalui tanya jawab pribadi antara pewawancara dengan responden atau orang

yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara; telah berkecimpung dalam kehidupan sosial dalam waktu yang relatif lama (Sutopo 2006: 72). Menurut Moloeng (2005 : 186) Wawancara mendalam merupakan eksplorasi informasi mendalam secara terbuka dan bebas mengenai masalah dan fokus penelitian serta ditujukan pada pusat penelitian. Dalam hal ini, metode wawancara rinci didasarkan pada kuesioner yang telah dirancang sebelumnya.

Hal yang membedakan dari wawancara biasa dengan wawancara mendalam ini adalah terletak pada sudut pandang keterlibatan dalam kehidupan responden/informan. Wawancara mendalam menggunakan pertanyaan terbuka untuk menyelidiki topik tertentu (berdasarkan maksud dan tujuan wawancara). Hal ini dilakukan untuk menggali pendapat berdasarkan perspektif responden ketika mempertimbangkan suatu permasalahan. Metode wawancara ini dilakukan dengan cara pewawancara melakukan wawancara secara pribadi.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang sudah ada untuk menemukan data-data tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian (Nazir, 2014). Penggunaan teknik studi pustaka digunakan untuk menjadikan temuan penelitian lebih komprehensif. Data-data di dalam teknik studi pustaka dapat berupa dokumen, buku, laporan, jurnal, arsip, dan berita yang relevan dengan topik penelitian.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian seperti yang dikemukakan menurut (Miles & Huberman, 1992) terdiri atas sejumlah tahapan, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan melakukan seleksi terhadap data-data yang sudah ditemukan. Penggunaan teknik analisis reduksi data dapat memilah data yang relevan dengan topik penelitian dan juga topik yang kurang relevan dengan topik penelitian, yang kemudian data yang ada akan menjadi lebih spesifik, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang jelas.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan lanjutan dari reduksi data. Teknik penyajian data dilakukan untuk mendeskripsikan data yang sudah direduksi melalui media tulisan. Pada tahapan ini, peneliti menyajikan data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan sehingga bersifat benar dan faktual.

3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Teknik pengambilan keputusan dan verifikasi merupakan salah satu tahapan lanjutan yang dilakukan setelah tahapan penyajian data. Pada tahap ini, peneliti melakukan deskripsi ulang mengenai data yang sudah disajikan.

4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir penelitian, akan dilakukan bentuk penarikan kesimpulan setelah jawaban dari seluruh objek permasalahan penelitian ditemukan di dalam penelitian. Pada tahapan ini peneliti melakukan sebuah konfigurasi penuh penggabungan simpulan yang merupakan bagian ditariknya dari data-data yang sudah disajikan.

1.9.7 Validasi Data

Validasi data merupakan tahapan terakhir di dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memeriksa ulang terhadap keabsahan suatu data di dalam penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan penelitian tersebut (Barlian, 2016). Selain itu, Creswell (2016) menyatakan validitas data dalam penelitian kualitatif merupakan tahapan untuk memeriksa akurasi hasil penelitian dengan menggunakan sejumlah prosedur tertentu. Menurut Creswell (2016) terdapat beberapa cara untuk melakukan proses validitas data antara lain:

1. Melakukan triangulasi terhadap sumber-sumber data yang berbeda agar dapat terbentuk sebuah justifikasi.
2. Melakukan *member checking* untuk menemukan keakuratan hasil penelitian.
3. Menulis deskripsi secara konkret mengenai hasil penelitian.
4. Menyajikan informasi yang berbeda sehingga dapat memberikan perspektif kontra terhadap tema tertentu.
5. Melakukan tanya jawab dengan peneliti lain untuk meningkatkan hasil penelitian yang lebih akurat.

1.9.8 Etika Penelitian

Peneliti akan menggunakan etika penelitian menurut (Loiselle dkk, 2004 dalam Palestin, 2007):

1. Menghormati harkat dan martabat manusia
Peneliti mempertimbangkan mengenai hak serta subjek untuk menerima informasi tentang proses penelitian, serta kebebasan memilih dan berpartisipasi pada kegiatan penelitian. Bagian dari kegiatan yang berkaitan dengan 44 prinsip penghormatan terhadap martabat manusia adalah penyusunan *informed consent* peneliti.

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian

Penelitian ini terdapat sebuah proses pengungkapan informasi pribadi, termasuk data pribadi, agar peneliti menghormati dan memperhatikan hak dasar dari individu.

3. Keadilan dan inklusi

Penelitian dilakukan dengan jujur, teliti, profesional dan manusiawi, serta memperhatikan ketelitian, kedekatan, perasaan psikologis dan religius subjek. Inti dari kebijakan penelitian adalah pembagian keuntungan dan beban secara adil, atau sesuai dengan kebutuhan sosial, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas. Para peneliti berpikir tentang kesetaraan hak gender dan subyek untuk mendapatkan perlakuan yang sama sebelum, selama dan setelah berpartisipasi dalam penelitian.

4. Pertimbangan keuntungan dan kerugian

Peneliti menerapkan metode penelitian untuk memperoleh hasil yang berguna untuk topik penelitian dan dapat menjawab pertanyaan permasalahan penelitian yang kemudian dapat digeneralisasikan ke tingkat populasi. Peneliti meminimalkan efek berbahaya pada subjek.